

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Bisnis

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnisman (*businessman*) itu sendiri.¹

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Atau bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa.

Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperatif yang

¹ M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 1

bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialis, dimana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja.

Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.²

Dari hasil penelitian George W. England terhadap 1.072 pimpinan perusahaan di Amerika Serikat, di peroleh pendapatan yang lebih beragam tentang tujuan perusahaan, yaitu:³

1. *Profitability* (menghasilkan keuntungan).
2. *Productivity* (menghasilkan produk dengan kualitas atau jumlah tertentu).
3. *Growth* (tumbuh dan berkembang).
4. *Employee* (memuaskan karyawan).
5. *Community interest* (memenuhi kebutuhan masyarakat).

Namun, bagi usaha bisnis, tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Di Indonesia, dari tujuan di atas agaknya masih dapat ditambahkan satu tujuan lagi, yaitu untuk *beribadah*, karena, masyarakat Indonesia memiliki pandangan religius atau keberagamaan yang kuat.⁴

² Dr. Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 4

³ Ibid, hal. 9

⁴ Ibid, hal. 10

B. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BUMN kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

Pembiayaan pinjaman lunak Pinjaman Lunak adalah *soft loan* yaitu fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu panjang; fasilitas ini diberikan oleh bank pembangunan multilateral dan bilateral, seperti IBRD, OECF untuk pembiayaan proyek pembangunan di negara -negara berkembang; biasanya, pinjaman lunak tersebut berjangka waktu panjang sampai dengan 50 tahun, selama masa tenggang hanya membayar bunga dan biaya pelayanan; negara berkembang dengan pendapatan per kapita rendah dan negara berkembang yang mempunyai masalah dalam neraca pembayaran akan memperoleh fasilitas dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari jadwal pembayaran yang lebih ringan.

C. Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qarada yang sinonimnya qatha'a yang berarti memotong.⁵ Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).⁶

Di dalam fiqih Islam, hutang piutang telah dikenal dengan istilah Al-Qardh. Makna Al-Qardh secara etimologi (bahasa) ialah Al-Qath'u yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang kepada orang yang menerima utang.

⁵ Ibrahim Anis, *et. Al, Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy, Kairo, Cet II, 1972*, hal. 726.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 273.

Atau dengan kata lain, menurut istilah hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga.

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur *faqaha*, rukun *qardh* adalah:

1. 'Aqid

Untuk '*aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*.⁷ Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- b. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.⁸

2. Ma'qud 'Alaih

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditukar (*malaikat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur,

⁷ Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabit*, Juz 2, Dar Al-Fikr, tt, hal. 479.

⁸ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, 1356 H, hal. 351.

barang-barang yang tidak bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan, barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembangkan dengan barang yang sama.⁹

3. Shighat

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Manfaat akad *al-qardh*, yaitu:¹⁰

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh al-hasan* juga didalamnya terkandung misi sosialnya disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan BUMN.

D. Program Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui Program Kemitraan dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden telah mencanangkan program kemitraan ada tanggal 14

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-iqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hal..723.

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 134.

Januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan kecil.¹¹

Pengertian kemitraan terdapat perbedaan untuk menambahkan dan memperkaya pemahaman kita mengenai kemitraan, maka akan dipaparkan beberapa pengertian di antaranya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemitraan artinya kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.¹²

Menurut Mohammad Jafar Hafsah, “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.”¹³

Menurut para ahli “Kemitraan adalah Hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.”¹⁴

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:¹⁵

¹¹ James dan Akasane, *Aspek-aspek finansial usaha kecil dan menengah*, (Jakarta:LP3ES, 1993), hal. 20

¹² Martin Carnoy dan Derek Shearer, *Economic Democracy*, (Sharpe Inc, 1980), hal. 275-276.

¹³ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hal. 10

¹⁴ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), hal. 35

¹⁵ Ibid, op, cit, hal. 14

- a. Unsur kerjasama usaha kecil disatu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Unsur saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan dalam mengelola suatu usaha agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁶ Adapun maksud dari program kemitraan ini adalah:¹⁷

- a. Memberdayakan potensi usaha kecil (sehingga menjadi soko guru perekonomian Nasional)
- b. Memanfaatkan kemampuan BUMN (dalam permodalan, teknik produksi, pengolahan, pemasaran, kualitas SDM) untuk membantu pengembangan usaha kecil.
- c. Meningkatkan hubungan sosial(BUMN dengan masyarakat dan lingkungan sekitar).

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*Win-Win Solution Partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal-balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai

¹⁶ Rivai, Veithzal, *Kredit Manajemen Handbook*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2006), hal. 482

¹⁷ Dokumentasi PT. Telkom Pekanbaru, 2014.

adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional, di sinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.¹⁸

2. Jenis- Jenis Kemitraan

Hubungan usaha antara industri besar atau menengah dengan industri kecil dapat dijalin melalui empat model kemitraan yaitu:¹⁹

a. Kemitraan Hulu-Hilir (Forward Linkage)

Model ini menempatkan industri kecil sebagai penyedia barang atau jasa untuk industri besar dan menengah yang terkait. Dengan demikian industri kecil tersebut mempunyai *captive market* yang dapat diandalkan tanpa harus mencari daerah pemasaran.

b. Kemitraan Hilir-Hulu (Backward Linkage)

Model kedua ini menempatkan industri kecil sebagai penyedia kebutuhan bahan mentah serta suku cadang bagi usaha besar dan menengah. Model ini mengantisipasi adanya monopoli dari perusahaan besar yang biasanya ingin menguasai seluruh aktivitas usaha mulai dari hulu sampai ke hilir yaitu mulai dari proses produksi hingga pemasaran produknya.

c. Kerjasama Pemilikan Saham

Hal ini dilakukan dengan cara memberikan prioritas penjualan saham *go public* pada kalangan industri kecil.

d. Kerjasama Bapak-Anak Angkat

Model kerjasama ini dapat secara *forward* maupun *backward*, dengan titik berat yaitu keharusan untuk membina dan ikut serta menjamin kelangsungan

¹⁸ Mohammad Jafar Hafsah, *Op. Cit*, hal. 63

¹⁹ Murti Sumarni, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 78

hidup sesama mitra usaha. Jadi industri besar atau menengah dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial.

Tujuan dari program kemitraan ini adalah:²⁰

- a. Mendorong berkembangnya Usaha Kecil agar tangguh dan mandiri.
- b. Mendorong meningkatkan pesan Usaha Kecil dalam perekonomian Nasional.
- c. Meningkatkan Citra Baik Perusahaan.

Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Program Kemitraan. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam melaksanakan program kemitraan agar tujuan tersebut terlaksanakan dengan baik:²¹

- 1) Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usaha.
- 2) Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
- 3) Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- 4) Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

²⁰ Dokumentasi PT. Telkom Pekanbaru, 2014

²¹ A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1998), Cet. Ke,1, hal. 117

Aspek-aspek penting yang dipertimbangkan dalam mempersiapkan program kemitraan. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan program kemitraan yaitu:²²

1) Aspek pembinaan

Merupakan pembinaan baik SDM, manajemen usaha, pasar dan informasi serta teknologi.

2) Aspek pembiayaan

3) Aspek Kemitraan

Untuk mendukung UKM yang tangguh dan mandiri diperlukan adanya kerjasama antara UKM dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan yang berprinsip saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling ketergantungan.

4) Aspek Yuridis Formal

Dalam aspek ini masih ditentukan beberapa kelemahan karena tidak diiringi dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada sistem ekonomi saat ini yang akan diarahkan pada Program Kemitraan:²³

- a) Perhatikan karakteristik daerah serta latar belakang keahlian mayoritas masyarakat setempat.

²² Zulkairnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nura, 2003), Cet. Ke, 1, hal. 14

²³ Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-2, hal. 66

- b) Kembangkan ekonomi berbasis rakyat yaitu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan keahlian mayoritas masyarakat setempat.
- c) Perhatikan ciri-ciri khas atau karakteristik daerah yang meningkatkan nilai (value) dari potensi yang ada.
- d) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat melalui perbankan infrastruktur atau fasilitas apapun agar ekonoomi rakyat tumbuh.
- e) Mendorong tumbuhnya industri berbasis poteensi lokal/UMKM dengan pemberdayaan pembentukan koperasi produktif.

3. Hubungan Antar Mitra

Posisi mitra pada umumnya, dapat dilihat dengan dua cara:

a. Harta Kemitraan

Harta kemitraan adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu modal awal kemitraan atau hasil usaha, baik melalui perdagangan maupun cara lain sebagai milik perusahaan atau untuk mencapai tujuan atau hal-hal yang menyangkut bisnis kemitraan.

b. Hak-hak pokok mitra

Seorang mitra memiliki hak-hak pokok sebagai berikut yang diberikan oleh co-mitra:

1. Diberikan kepercayaan sepenuhnya secara fair dan baik dari co-mitranya dalam segala bentuk kemitraan.
2. Berhak untuk ikut ambil bagian dalam manajemen bisnis kemitraan.

3. Dapat mencegah masuknya mitra baru atas persetujuan co-mitranya.
4. Sifat dari bisnis kemitraan tidak dapat diubah tanpa persetujuan mutlak dari seluruh kemitraan, dan apabila menyetujui setiap mitra dapat menggunakan, meneliti dan mencontoh sebagian yang ada.
5. Mitra tidak dapat dipecat begitu saja dengan mayoritas co-mitra kecuali atas kesepakatan diantara mitra.
6. Berhak untuk memperoleh upah atau bagian dari perusahaan yang dianggap sebagai gaji atau wewenang pribadi yang diberikan kepadanya.
7. Semua mitra berhak untuk andil yang sama dalam permodalan dan perolehan keuntungan bisnis dan juga sama-sama memikul beban jika mengalami kerugian.
8. Dapat memberikan secara mutlak atau melalui perwakilan asset dan keuntungan yang menjadi bagiannya didalam kemitraan dan orang yang diberi tersebut berhak untuk menerima, baik itu seluruhnya ataupun sebagian dari keuntungan tersebut.

Dalam bermitra syariah, akad yang digunakan adalah seperti kerjasama *musyarakah* dan *mudharabah*.

E. Usaha Kecil

1. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil dan nilai kekayaan yang kecil dan jumlah pekerjaan yang juga kecil.²⁴

Menurut Subanar, Usaha Kecil memiliki arti strategis secara khusus bagi perekonomian di antaranya:²⁵

- a. Dalam banyak pekerjaan produk tertentu, perusahaan besar banyak menggantungkan kepada perusahaan-perusahaan kecil. Karena jika dikerjakan sendiri oleh mereka (perusahaan besar) maka marginnya tidak ekonomi.
- b. Merupakan pemerataan konsentrasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat.

Pengertian usaha kecil diatur dalam berbagai ketentuan, antara lain UU no. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil : Kepmen BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, yang pada intinya sama: Kepmen Keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 tentang pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. Pengertian usaha kecil dalam ketiga ketentuan tersebut adalah usaha yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 200.000.000 atau memiliki hasil penjualan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000.
- b. Milik warga negara Indonesia.

²⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 365

²⁵ Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE, 1997), hal. 18

- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- d. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.²⁶

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp. 200.000.000,-.²⁷ Menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS) , usaha kecil identik dengan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjaan yaitu:²⁸

- a) Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang.
- b) Industri kecil dengan pekerja 19-20 orang.
- c) Industri rumah tangga dengan pekerja 20-29 orang.
- d) Industri dengan pekerja 100 atau lebih.

2. Jenis-Jenis Usaha

Pada umumnya usaha dapat dibedakan menjadi tiga diantaranya adalah usaha mikro, usaha menengah dan usaha makro. Menurut Awalil Rizky, usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, dan omzet yang sangat kecil. Ciri lain dari usaha mikro ini adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha tidak tetap dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha.

²⁶ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 306

²⁷ Suryana, *Kewirausahaan (Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses)*, (Bandung: Salemba Empat, 2003), hal. 119

²⁸ Mudrahat, Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hal. 365

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1995 adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁹

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang dilakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.³⁰

Departemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok:³¹

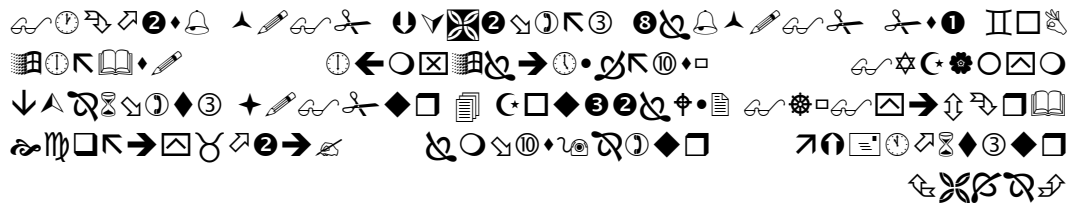
- a. Industri kecil adalah usaha yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp. 70.000.000,- investasi tenaga kerja maksimum 625000,- jumlah tenaga kerja dibawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari 100.000,- di banding perdagangan.
- b. Perdagangan kecil yaitu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp. 80.000.000,- dan

²⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2009), hal. 42

³⁰ Mulyadi Nitisusant, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: alvabeta, 2010), hal. 268

³¹ Euis Amalia, *Op.Cit.* hal. 43

terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan di syariatkannya hutang piutang ialah sebagaimana berikut ini:



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245).

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, yaitu untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Berbanding lurus dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai bagian dari hidup yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.